MATRIK *GENDER ANALYSIS PATHWAY* (GAP)

OPD : BAGIAN HUKUM

PROGRAM : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : **Penataan Peraturan Perundang-undangan** **Kegiatan :** Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Bimtek Legal Drafting) **Tujuan :** Menciptakan produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	1. JumlahpendudukKabupaten Agam 518.695 orang, laki-laki 2. JumlahPeraturan Daerah Tahun 2019 sebanyak 10 buah,Peraturan Bupati 74 buah, Keputusan Bupati sebanyak 543 buah. 3. Kegiatan Harmonisasi dan pengkajian produk hukum daerah yang direncanakan sebanyak 15 kegiatan, dengan realisasi sebanyak lebih dari 30 kegiatan. 4. Jumlah sdm Tim Pengkaji dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan pembahas ranperda inisiatif berjumlah lebih kurang 10 orang yang terdiri dari Unsur pimpinan, Personil Bagian Hukum dan utusan dari OPD Pemrakarsa, laki-laki dan perempuan.	- **Akses :** Peserta rapat pengkajian dan harmonisasi produk hukum daerah dari OPD Pemrakarsa dibatasi, yaitu hanya yang menguasai/ memahami materi Rancangan Produk Hukum, jika dapat haruslah pejabat dari Bidang terkait pada OPD. Selain itu fokus pembahasan masih kurang responsif gender. - **Partisipasi** Perempuan yg hadir sebagai peserta rapat (dalam hal ini staf, bukan pejabat terkait) kurang berpartisipasi dalam rapat penyusunan dan pembahasan produk hukum	- Adanya kebijakan penyelenggara kegiatan (BagianHukum) untuk membatasi unsur peserta rapat pengkajian dan harmonisasi produk hukum daerah, yaitu hanya pejabat yang diundang. - Belum munculnya pengakajian responsif gender dalam tugas tim yang tercantum dalam SK Bupati. - Belum ada data terpilah (per sektor, laki-laki, perempuan) dalam daftar hadir rapat Tim.	- Belum adanya kebijakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang responsif gender di Daerah - Kurangnya kapasitas pemrakarsa produk hukum daerah dalam bidang legal drafting. - Kurangnya anggaran untuk kegiatan pengkajian dan harmonisasi produk hukum daerah.	Menciptakan produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan responsif gender	**Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan:** - Menyempurnakan nomenklatur kegiatan agar lebih fokus, sehingga menjadi Kegiatan Perencanaa, harmonisasi evaluasi, dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan - Perencanaan kebutuhan peraturan daerah melalui Pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	- JumlahPeraturan Daerah Tahun 2019 sebanyak 10,buah,Peraturan Bupati 74 buah, Keputusan Bupati sebanyak 543 buah. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2019 hanya 10 produk hukum daerah yang responsif gender -Jumlah Personil/ Unsur Tim Pengkaji dan Harmoni sasi Produk Hukum Daerah dan Tim Pembahas Ranperda Inisiatif, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan (jumlah tidak bisa dipastikan)	**Output :** 600 buah produk hukum daerah, 24 kegiatan pengkajian dan harmonisasi produk hukum daerah. **Outcome:** Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah yang Responsif Gender hingga 10% Tahun berikutnya.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		daerah tersebut. - **Manfaat** Pengalaman dalam rapat pembahasan dan pengkajian produk hukum daerah dimaksud masih belum terlalu dirasakan manfaatnya oleh staf untuk pengembangan pengetahuannya terkait penyusunan produk hukum daerah.				dengan pendekatan responsif gender; - Melaksanakan pengkajian dan harmonisasi terhadap produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dan kepentingan umum, serta mewujudkan produk hukum daerah yang responsif gender dan anak - Melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan terbaru, melanggar kepentingan umum serta yang tidak responsif gender dan anak; - Memasukkan materi responsif gender dalam		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
						penyelenggaraan Bimtek Legal Drafting - Melaksanakan sosialisasi peratutan perundang-undangan pada masyarakat maupun ASN.		

TIM DRIVER PPRG Kab. Agam

1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, S.Pd, M.PdT (Bakesbangpol)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (Dalduk KB PP PA)

KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SETDA

DESNAWATI, SH. MH
Pembina (IV a)
NIP. 19661217 199202 2 001

Lampiran 1.

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BAGIAN INFRASTRUKTUR SETDA AGAM

PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : **PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** **Kegiatan :** Operasional Administrasi Bagian Infrastruktur **Tujuan :** Terwujudnya Pelayanan dan Operasional Administrasi Bagian Infrastruktur	Informasi terkait kegiatan - Lingkup tugas Bagian Infrastruktur meliputi koordinasi, evaluasi dan monitoring pembangunan infrastruktur dibidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Pemukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. - SDM yang ada sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dengan uraian 1 orang Kabag (perempuan) dan 2 orang Kasubag (laki-laki) 1 orang Bendahara pengeluaran pembantu (perempuan) tanpa adanya staf. - Bagian Infrastruktur	- Kurangnya Sumber Daya Manusia. - Tidak adanya staf untuk membantu pekerjaan administrasi. - Adanya beban kerja ganda dimana satu ASN merangkap pekerjaan yang tidak dalam tupoksinya. - Belum lengkapnya sarana dan prasarana, seperti Kendaraan bermotor roda 2.	- Keterbatasan anggaran - Pejabat terkait belum responsif gender, seperti : - Belum adanya sosialisasi SOP kepada para pegawai terkait tupoksi masing-masing pegawai - Belum adanya pertemuan yang menampung dan mengadvokasi kebutuhan/keluhan bawahan - Pelaksanaan reward dan punishment yang belum diterapkan. - Belum adanya	- Keterlambatan pada proses . Pekerjaan didasari terhadap perputaran siklus, sehingga satu proses terhambat akan menghambat proses berikutnya - Beberapa proses pekerjaan tergantung terhadap jaringan internet dan aplikasi.	Tercapainya, lancar dan terakomodirnya operasional administrasi perkantoran	Operasional Administrasi Bagian Infrastruktur - Pengadaan sarana prasarana - Koordinasi, evaluasi dan monitoring pembangunan infrastruktur.	- SDM yang ada sebanyak 4 orang, terdiri dari: • Laki-laki: 2 orang • Perempuan 2 org -	**Output :** Lancarnya operasional administrasi perkantoran **Outcome:** Lancarnya Koordinasi dan Terfasilitasinya Pembangunan Infrastruktur

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	merupakan unit kerja yang baru dibentuk (dibentuk mulai awal tahun 2017) - Sarana dan prasarana yang ada : Meja 4 unit Kursi 5 unit Komputer 2 unit Laptop 2 unit Printer 2 unit Kamera 1 unit Filing Kabinet 1 unit Lemari arsip 1 unit		penerapan manajemen waktu kerja yang ketat					

TIM DRIVER PPRG Kab. Agam :

1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, S.Pd, M.PdT (Bakcuda)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (Dalduk KB PP PA)

Lubuk Basung, 17 April 2020

Kepala Bagian Infrastruktur,

ROSVA DESWIRA, S.Pi, M.Si

Pembina

NIP. 19721209 200604 2007

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH KAB. AGAM
PROGRAM : ADMINISTRASI UMUM PROGRAM PENATAAAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN : 2021

Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 3.01.01.02.04.36 Program Penataaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian **Kegiatan :** 3.01.01.02.04.36 .06 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah **Tujuan :** Terselenggarany	➢ SDM yang ada sebanyak 7 orang terdiri dari 1 orang Kabag dan 3 orang Kasubag,3 orang staf ➢ Sarana dan prasarana yang ada : a. Meja ½ biro sebanyak 1 unit b. Meja eselon III sebanyak 1 unit c. Meja kerja sebanyak 8 unit	➢ Masih terbatasnya akses perempuan dalam memberikan pelayanan di OPD sehingga perannya masih belum maksimal ➢ Masih adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam pelayanan publik	➢ Masih rendahnya kemampuan dan peran dalam pemberian pelayanan pada Perangkat Daerah maupun masyarakat, hal ini dikarenakan masih belum maunya perempuan unjuk diri dan unjuk kemampuan , kebayakan	➢ Masih terbatasnya pemikiran dan budaya yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan itu sebaiknya tidak sepenuhnya bekerja di Kantor, sebab perempuan juga harus memikirkan suami, anak dan rumah	➢ Dalam kegiatan ini, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan publik pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Agam, kita akan lebih meningkatkan dan mengukur kemampuan dan peranan perempuan dalam	➢ Melakukan pembinaan terhadap perempuan untuk dapat berperan lebih aktif serta memiliki kepercayaan diri dalam memberikan pelayanan publik.	➢ SDM yang ada sebanyak 7 orang, terdiri dari: • Laki-laki: 4 orang • Perempuan 3 org -	➢ Adanya kenaikan peran serta perempuan dalam pelayanan publik sehingga diharapkan skor indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggaranakan OPD kedepan lebih maksimal.

Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
a pelayanan publik yang bermutu dan terukurnya Indek Kepuasan Masyarakat dengan nilai yang lebih baik	d. Kursi putar sebanyak 8 unit e. Kursi pejabat eselon III sebayak 1 unit f. Kursi tamu sebanyak 2 unit g. Komputer sebanyak 2 unit h. Laptop sebanyak 5 unit i. Printer sebanyak 1 unit j. Lemari sebanyak 6 unit	➢ Masih rendahnya kemampuan kontrol perempuan dalam memberikan pelayanan, mereka lebih mengandalkan laki-laki dalam memberikan pelayanan pada OPD ➢ Masih rendahnya partisipasi perempuan untuk memanfaatkan pelayanan publik di OPD i untuk	dari mereka masih menerima apa yang ada saja.	serta lain sebagainya. Sehingga wanita karier masih belum begitu diterima dalam masyarakat	memberikan pelayanan, sehingga ada kesetaraan atau kesamaan kesempatan bagi perempuan untuk berbuat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada publik			

Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	k. Televisi sebanyak 1 unit l. WIFe sebanyak 1 unit m. Ac sebanyak 1 unit	menunjukkan jati dirinya.						

TIM DRIVER PPRG Kab. Agam :
1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Busri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Supria Asdel Erianto, S.Pd, M.PdT (Bakeuda)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (Dalduk KB PP PA)

Lubuk Basung, Juni 2020

Kepala Bagian Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Agam

ROZA LINDA, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690518 198903 2 003

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2021

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program: Penataan Administrasi Kependudukan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender (out come)
Kegiatan: Peningkatkan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan **Tujuan :** Seluruh Penduduk Kabupaten Agam memiliki Akta kelahiran	- Belum seluruh penduduk Kab Agam memiliki Akta Kelahiran. - Dari Jumlah Penduduk Kabupaten Agam 530.536 jiwa 267.277 laki-laki dan 263.259 perempuan), dari jumlah	**Akses :** Masih ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan informasi dan sulitnya transportasi terutama bagi perempuan. **Partisipasi :** 98.087 (18,56%) perempuan yg	- Pendataan yang belum terpilah gender antara laki dan perempuan - Kurangnya SDM dalam pengolahan data terpilah -	- Sulitnya transportasi ketempat pelayanan bagi penduduk yang jauh dari pusat pelayanan - Keterbatasan perempuan untuk mengurus dokumen kependudukan (akta kelahiran).	Seluruh penduduk baik laki2 maupun perempuan di Kabupaten Agam memiliki Akta Kelahiran	- Melakukan pendataan terhadap masyarakat daerah yang kesulitan transportasi - Melakukan sosialisasi ke daerah terpencil dan jauh dari pusat pelayanan. - Melaksanakan pelayanan	- Belum seluruh, penduduk Kab Agam memiliki Akta Kelahiran - Dari Jumlah Penduduk Kabupaten Agam 530.536 jiwa (267.277 laki dan 263.259 perempuan), yang telah memiliki akte kelahiran 230.407 jiwa, terdiri dari 116.407 laki-	**Output** - Meningkatkan cakupan pelayanan penerbitan akta kelahiran dari 76% pada tahun 2020 menjadi 90 % pada tahun 2021 - Meningkatkan pelayanan pada 4 (empat) kecamatan yang

	penduduk diatas yang sudah punya akte kelahiran sebanyak 230.407 jiwa terdiri dari 116.407 laki-laki dan 114.000 perempuan, dan masih ada 300.129. jiwa yang belum memiliki akte kelahiran - Dari 16 kec.masih ada 4 kec.yang wilayahnya terpencil yang kemungkinan besar belum	sdh punya akte dan 99.906 (19. %) laki2 yg sdh punya akte. **Kontrol :** Biasanya laki-laki yang lebih dominan untuk mendapatkan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukan (akta kelahiran) **Manfaat:** Bukti sah identitas seseorang, dan sebagai syarat masuk sekolah mulai dati TK sampai Perguruan Tinggi.		- Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Fungsi dan Kegunaan Akta Kelahiran -		langsung ke daerah yang jauh dari pusat pelayanan.	laki dan 114.000 perempuan. yang belum memiliki akta kelahiran 300.129 jiwa	daerahnya sulit dan jauh dari pusat pelayanan. **Outcome** - Terwujudnya Tertib Administrrasi Kependudukan Kabupaten Agam - Seluruh masyarakat Kab Agam memiliki akte kelahiran.

	banyak yang memiliki akte kelahiran terutama perempuan.							

TIM DRIVER PPRG Kab. Agam :

1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, S.Pd, M.PdT (Bakesbangpol)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (Dalduk KB PPPA)

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PP DAN PA KABUPATEN AGAM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Program Program Keluarga Berencana Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Tujuan Meningkatkan Ratio Akseptor KB	1. Pencapaian TFR masih tinggi yaitu : 3,64 dari target 2,7 2. Pencapaian peserta KB aktif sebanyak 65 % : perempuan sebanyak 4.111 akseptor dan peserta KB aktif laki-laki sebanyak 2.537 akseptor. Peserta KB aktif masih didominasi oleh perempuan 3. Tenaga Penyuluh KB yang	**Akses:** Akses mendapatkan pelayanan KB masih kurang **Partisipasi:** Masih kurangnya partisipasi laki-laki sebagai akseptor KB **Kontrol:** Dalam mnentukan kepesertaan akseptor KB berdasarkan target/PPM yang ditetapkan oleh	1. SDM yang melakukan pelayanan belum maksimal terutama dalam komunikasi interpersonal 2. Terbatas jumlah tenaga PKB karena banyak yang memasuki masa pensiun; 3. Belum maksimalnya sosialisasi dan	1. Image masyarakat bahwa yang ber KB itu adalah perempuan 2. Masih berkembangnya image masyarakat banyak anak banyak rezeki 3. Akseptor KB masih peserta jangka pendek 4. Terlalu Luas wilayah Agam	Meningkatnya Rasio Akseptor KB	1. Memberdayakan kader-kader KB sebanyak 1.251 orang (PPKBD : 467 orang dan Sub PPKBD 783 orang) 2. Meningkatkan pengetahuan PKB dan kader melalui On the Job Training; 3. Meningkatkan superisi dalam memonitor pencapaian peserta KB baru dan KB.	1. Pencapaian TFR masih tinggi yaitu : 3,64 dari target 2,7 2. Pencapaian peserta KB aktif sebanyak 65 % : perempuan sebanyak 4.111 akseptor dan peserta KB aktif laki-laki sebanyak 2.537 akseptor. Peserta KB aktif masih didominasi oleh perempuan Tenaga Penyuluh KB yang melakukan pelayanan sebanyak 18 orang (perempuan : 16 orang dan laki-laki:	Out put : Pemberian layanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin sebanyak 19.200 PUS Out Come : 1. Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas 2. Meningkatnya kompetensi tenaga

	melakukan pelayanan sebanyak 18 orang (perempuan : 16 orang dan laki-laki: 2 orang 4. Minimal jumlah Tenaga Penyuluh KB 1(satu)Nagari 1 (satu) Penyuluh KB (82 Nagari : 82 Penyuluh KB	Provinsi dan nasional (Ratio Akseptor KB/1000 PUS **Manfaat:** Program KB bermanfaat untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil yang berkualitas	advokasi KIE Monitoring dan evaluasi masih belum maksimal				2 orang 4.Minimal jumlah Tenaga Penyuluh KB 1(satu)Nagari 1 (satu) Penyuluh KB (82 Nagari : 82 Penyuluh KB	penyuluh dan kader KB

TIM DRIVER PPRG Kab. Agam :
1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Gasri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, S.Pd, M.PdT (Badan Keuangan Daerah)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (Dalduk KB PP PA)

Lubuk Basung, 27 Februari 2020

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ir. Erniwati, MSP
Pembina Utama Muda
NIP. 19640307 199202 2 001

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB PP DAN PA KABUPATEN AGAM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
PROGRAM : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak KEGIATAN : Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan TUJUAN Meningkatkan Kompetensi focal point pada OPD dan Nagari dalam menerapkan dan menyusun dokumen PPRG	1. Berdasarkan SK Bupati Agam no. 116 tahun 2020, komponen perencanaan dari 52 OPD yang tergabung dalam focal point Kab.Agam sebanyak 60 orang. 2. Focal point dari masing-masing OPD terdiri dari 57 % perempuan dan 43 % laki-laki 3. Berdasarkan hasil pemetaan dan pengamatan,	**Akses:** Mendapatkan pegetahuan dan ketrampilan tentang PPRG melalui pelatihan, sosialisasi dan pembinaan masih kurang **Partisipasi:** Masih kurangnya partisipasi focal point dalam mengikuti sosilisasi, pelatihan dan bimbingan teknis lebih dominasi	1. SDM yang mendapat pelatihan sebelumnya telah dimutasi 2. Adanya focal point OPD yang masih belum memahami PUG dan PPRG 3. Belum maksimalnya Pembinaan, monitoring dan evaluasi oleh Tim Teknis PUG terhadap	1. Komitmen pimpinan OPD masih belum maksimal 2. Belum sinerginya anggota TAPD dalam memahami PPRG 3. Image masyarakat masih rendah terhadap PUG	Meningkatkan Kompetensi focal point OPD dalam menerapkan PUG dan PPRG	1. Advokasi dan sosialisasi kepada semua pimpinan OPD, TAPD dan stakeholder terakait. 2. Pelatihan PPRG bagi semua anggota focal Point bagi di Kab, Kecamatan dan Nagari. 3. Melakukan pembinaan dan superisi dalam memonitor pencapaian kegatan yang	1. Berdasarkan SK Bupati Agam no. 116 tahun 2020, komponen perencanaan dari 52 OPD yang tergabung dalam focal point Kab.Agam sebanyak 60 orang. 2. Focal point dari masing-masing OPD terdiri dari 57 % perempuan dan 43 % laki-laki 3. Berdasarkan	**Out put :** Penyusunan dokumen PPRG berupa GAB dan GBS pada 52 OPD dan 20 Nagari **Out Come :** Terwujudnya Pembangunan yang perspektif gender

(GAB dan GBS)	ternyata 75 % anggota focal point beum memahami tugas dan fungsi dalam pelaksanaan PPRG	perempuan dibandingkan laki-laki **Kontrol:** Dalam menentukan kepesertaan lebih didoinasi oleh keputusan pimpinan **Manfaat:** Para perencana program pada focal point kurang mendapatkan mamfaat dari kegiatan yang responsif gender	focal point OPD			tertera di dokumen GAP dan GBS.	hasil pemetaan dan pengamatan, ternyata 75 % anggota focal point beum memahami tugas dan fungsi dalam pelaksanaan PPRG	

Tim driver PPRG kab Agam.

1. Andri, ST, MT (Bappeda).
2. Gusri Noval, MSi (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, Spd, M. PdT (Bakeuda).
4. Yulhendri, SKM, Mkes (Dinas dalduk KBPPPA).

Lubuk Basung, 27 Februari 2020

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ir. Erniwati, MSP
Pembina Utama Muda
NIP. 19640307 199202 2 001

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM: Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
KEGIATAN: Jaminan Persalinan TUJUAN: Meningkatkan derajat kesehatan Ibu.	1. Data jumlah penduduk 491.282 jiwa 2. Data Pasangan usia subur 77.296 Jiwa 3. Data ibu hamil 10.314 jiwa 4. Yang memiliki jaminan kesehatan 83% 5. Data yang telah memanfaatkan jaminan persalinan 429 org 6. Kasus ibu meninggal 164,7 per 100.000 KH	1.Akses ibu hamil mendapatkan jaminan kesehatan	1.Pendataan ibu hamil beresiko belum lengkap 2. Pendataan ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan 3. Feek back informasi jaminan kurang 4. Bidan tidak ada ditempat	1.Rasa gengsi mendapatkan pelayanan kelas III 2. Masih ada daerah sulit 3. Rendahnya dukungan keluarga	Meningkatkan derajat kesehatan ibu bersalin	1.Pendataan ibu hamil yang beresiko 2.Sosialisasi jaminan kesehatan pada masyarakat 3.Lakukan pembinaan pada bidan desa 4.Pelayanan jaminan kesehatan ibu bersalin 5.Monitoring pelaksanaan jaminan kesehatan	1.Data ibu hamil yang memanfaatkan pelayanan jaminan persalinan Tahun 2016 sebanyak 16 orang, Tahun 2017 sebanyak 157 orang, dan Tahun 2018 sebanyak 429 orang	Output 1.Jumlah ibu hamil yang memanfaatkan jaminan persalinan Outcome 1. Cakupan Persalinan di sarana kesehatan

Tim Driver PPR6 Kab. Agam:
1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Busri Noval, M, Si (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, S.Pd, M.Pd.T (Badan Keuangan Daerah)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kep (Dinas Paldak KB PP PA)

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
KEGIATAN: Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (DAK) TUJUAN: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Lansia	1. Dari 23 Puskesmas baru 47,8 % yang sudah sesuai Permenkes nomor 75 tahun 2014 2. Permenkes nomor 75 tahun 2014 bab IV pasal 9 mengatur persyaratan bangunan untuk lansia 3. Puskesmas yang belum sesuai standar tidak memiliki sarana yang dibutuhkan para lansia	***Akses*** Masih kurangnya sarana prasarana yang dimiliki Puskesmas untuk melayanai kebutuhan dan permasalahan lansia terkait permasakahan kesehatan ***Partisipasi*** Masih rendahnya partisipasi	1.Masih terbatasnya sarana dan prasaranan yang dimiliki Puskesmas	1.Perlunya dukungan pemangku kebijakan dalam memenuhi sarkes untuk lansia	Meningkatkan pelayanan kesehatan pada lansia di Puskesmas	1. Melakukan advokasi pada pemangku kebijakan dalam melengkapi sarana kesehatan 2. Membangun Puskesmas yang sesuai Permenkes 75 tahun 2014	1. 47,8 Puskesmas telah sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014 2. Jumlah kunjungan lansia 60%	Output 1. Meningkatnya pelayanan terhadap Lansia Outcome Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan

	seperti telaris pegangan tangan 4. Angka Harapan Hidup dari tahun ketahun meningkat, sehingga jumlah Lansia cukup banyak 5. Jumlah lansia tahun 2019 sebesar 65.293 jiwa (13,3%) 6. Meningkatnya kejadian penyakit tidak menular (DM, Hipertensi) yang umum diderita para Lansia 7. Permenkes no. 4 Tahun 2019, menyatakan 100% lansia mendapatkan scrining kesehatan	lansia dalam mendapatkan layanan kesehatan						

TIM DRIVER PPR6 Kab. Agam :

1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Busri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, S.Pd, M.PdT (Badan Keuangan Daerah)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (Dalduk KB PP PA)

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
PROGRAM : "PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA" KEGIATAN : "PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA" OUTPUT : Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah nagari dalam menyusun RAB, RKP dan APB Nagari yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat yang responsif gender	-Walinagari : L : 81 = 98.7 % P : 1 = 1.3% Perangkat Nagari L : = 246=42,85% P : = 328=57,15% - BAMUS : L : 437 =63,99% P : 246 =36,01% - Data tentang UU desa mewajibkan pemeririntah ttg anggaran - Pembangunan di nagari sebelumnya lebih banyak datangnya dari atas (top down) - UU desa no 6 tahun 2014 mengharuskan bahwa kerangka pembangunan di nagari diperlukan partisipasi masyarakat	Faktor Kesenjangan Ada kesenjangan dalam penetapan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan disebabkan : **Akses** terhadap pemahaman responsif gender di tingkat nagari masih rendah. **Partisipasi** perempuan masih rendah dalam keikutsertaan pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Masih kuatnya ; **nilai-nilai** di masyarakat bahwa perempuan lebih baik berkiprah	Sebab Kesenjangan Internal 1. Kurangnya pemahaman gender pada perencana dan pelaksana program pembangunan nagari 2. Belum adanya juknis penyusunan RKP Nagari yang memuat responsif gender	Sebab Kesenjangan Eksternal Masih adanya nilai-nilai di masyarakat bahwa perempuan lebih baik mengurus rumah tangga saja	Reformulasi Tujuan "Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan"	Rencana Aksi 1. Meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui sosialisasi dan advokasi gender 2. Melakukan review RKP Nagari dengan berbasis perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 3. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang PUG bagi masyarakat	Data dasar (Base line) -Walinagari : L : 81 = 98.7 % P : 1 = 1.3% Perangkat Nagari L : = 246=42,85% P : = 328 =57,15% - BAMUS : L : 437 =63,99% P : 246 =36,01% -Juknis dalam penyusunan RKP Nagari belum mengarah ke masalah gender	Indikator gender (outcome) hasil yang diharapkan output : 1. Terlaksananya bimtek penyusunan RKP Nagari yg sudah responsif gender 2. meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat perempuan dan laki-laki dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 3. perencanaan, pelaksanaan pembangunan. -Walinagari : L : 60% P : 40% -Perangkat Nagari L : 50% P :50% -BAMUS : L : 50 % P : 50 %

	-Juknis dalam penyusunan RKP Nagari belum mengarah ke pesertaan masyarakat baik laki-laki dan perempuan secara tegas (kurangnya responsif gender)	didalam rumah tangga saja. **Kontrol** Perempuan lebih sedikit berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di nagari : Manfaat : meningkatkan kemauan dan partisipasi masyarakat perempuan dan laki-laki dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.						outcome : - Tersusunnya perencanaan pembangunan nagari lebih baik, terarah, efektif dengan mempertimbangkan responsif gender Impact : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari

TIM DRIVER PPRG Kab. Agam :

1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Supria Asdel Trianto, S.Pd, M.PdT (Baleuda)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (PaldUk KB PP PA)

Lubuk Basung, April 2020

KEPALA,

TEDDY MARTHA,S.STP
Pembina Utama Muda I
NIP. 19780311 199703 1 002

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KAB. AGAM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	**Data Pembuka wawasan**	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Kegiatan : Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Masih banyaknya angkat	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data dasar (Base line)	Indikator gender (outcome) hasil yang diharapkan
Tujuan : Meningkatnya Kompetensi dan Keahlian Angkatan Kerja	kerja yang belum memperoleh pekerjaan **Angkatan Kerja :** LK : 137.929 PR : 104.453 Jumlah : 242.382 **Bekerja :** LK : 132.122 PR : 98.808 Jumlah : 230.930 **Penganggur :**	Akses Belum meratanya kesempatan kerja bagi perempuan dibanding dengan kesempatan kerja bagi laki laki. Akses ketersediaan lapangan pekerjaan	SDM yang tersedia dan penentu kebijakan belum semuanya responsif gender Tingginya tingkat mobilitasi pegawai yang mengelola permasalahan	Masih adanya nilai-nilai di masyarakat bahwa perempuan lebih baik mengurus rumah tangga saja Adanya aturan yang melarang untuk perempuan bekerja sampai malam	Meningkatnya kompetensi dan keahlian tenaga kerja Angkatan kerja terutama perempuan. Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja penganggur	Melaksanakan rapat da koordinasi Dengan stakeholder terkait 1. Melakukan pendataa jenis pelatihan yang dibutuhkan dimasing-masing Naga 2. Melakukan sosialisa terkait faktor keamana	Tingkat pengangguran terbuka, rata-rata 4,82% Pr : 7,10 Lk : 3,12 Tingkat partisipasi angkatan kerja Pr : 56,55 Lk : 80,80 Rata-rata : 68,30%	**Indikator Out put** Terlaksananya Pelatihan bagi angkatan kerja. Laki- Laki 32 org Perempuan 48 org **Indikator Out come :** Meningkatnya Partisipasi

	LK : 5.807 PR : 5.645 Jumlah : 11.452 **Bukan Angkatan Kerja :** LK : 31.313 PR : 75.609 Jumlah : 106.922 **Sekolah :** LK : 16.482 PR : 18.585 Jumlah : 35.069 **Mengurus Rumah Tangga :** LK : 3.092 PR : 49. 652 Jumlah : 52.744	Perempuan lebih kecil dibanding laki – laki, **Jarak Tempuh Kerja** Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah bagi perempuan. Kontrol: Peluang dan kesempatan kerja yg tdk sesuai	gender Kurangnya kemampuan Kompetensi angkatan kerja Belum tersedianya jenis pelatihan yg dibutuhkan oleh angkatan kerja.	tingginya tingkat kriminalitas bagi perempuan yang bekerja malam belum maksimalnya peran dari orang tua, tokoh masyarakat.		khususnya bagi perempuan. 3. Meningkat kan kapasitas SDM Aparatur 4.Melakukan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi & pemantauan 5.Melakukan Fasilitasi Ketersediaan lapangan kerja (Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja)		angkatan kerja untuk mengikuti diklat. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja. Tingkat Pengangguran menurun menjadi 4,72% .

	Berdasarkan data statistik diperoleh tingkat pengangguran terbuka sebanyak Pr : 7,10 Lk : 3,12 Rata2: 4,82% Asumsi data nasional dimana Tingkat partsipasi angkatan kerja di Kab. Agam Pr : 56,55 Lk : 80,80 Rata-rata : 68,30% Jenis Pelatihan yang direncanakan : - Pelatihan Sepeda Motor Konvensional (MTU) - Pelatihan Hiasan Busana dengan Mesin Bordir Manual (MTU)	Manfaat : Rendah manfaat yang dirasakan bagi angkatan kerja Khususnya Perempuan						

	- Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue - Pelatihan Bahan Pengelasan SMAW 3G (MTU)							

Lubuk Basung, April 2020

KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DINAS PMPTSP DAN NAKER

Dra. Hj. RETMIWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19620219 198210 2 001

Tim Driver PPRG Kab. Agam

1. ANDRI. ST, MT (Bappeda Agam)
2. GUSRINOGAL, MSI (Inspektorat)
3. SUFRIA ASDEL ERIANTO. SPd. M PdT (Bekeuda).
4. Yulhandri. SKM MKg. (Dm Dalbur Kb. PP PA)

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BAPPEDA KABUPATEN AGAM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pogram Perencanaan pembangunan daerah Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah *Tujuan :* *Tersedianya pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah* *Melalui tahapan musrenbang*	Data Pembuka Wawasan 1. Peserta dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah adalah: 82 wali nagari, 81 laki-laki, 1 perempuan. 16 camat, 14 laki-laki dan 2 perempuan. Tenaga perencanaan di Bappeda 9 laki-laki dan 16 wanita. OPD terkait sekitar 60% laki-laki dan 40 % perempuan. KAN 100% laki2, Bundo Kanduang 100 % perempuan, PKK dan Darmawanita 100 % perempuan, UPT dikecamata 60	Isu Gender Faktor Kesenjangan 1. Akses : Tidak semua masyarakat bisa mengikuti musrenbang, karena keterbatasan waktu, tempat dan dana. 2. Partisipasi : Belum semua peserta dapat menyampaikan aspirasi mereka karena keterbatasan waktu. 3. Manfaat : Pembahasan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Internal 1. Terbatasnya Anggaran dalam pelaksanaan musrenbang 2. Manajemen pelaksanaan belum efektif 3. Perspektif masyarakat tentang pembangunan adalah pemenuhan infrastruktur dan pelatihan keterampilan	Isu Gender Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Pesimistis masyarakat apa yang mereka usulkan tidak semuanya dapat diakomodir	Kebijakan dan Rencana Ke Depan Reformulasi Tujuan *Tersedianya pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui musrenbang*	Kebijakan dan Rencana Ke Depan Rencana Aksi 1. Melaksanakan kegiatan musrenbang dengan manajemen yang efektif . 2. Melakukan advokasi kepada pimpinan Daerah terkait dengan aspiras permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang responsif gender	Pengukuran Hasil Data Dasar (Base-line) 1. Peserta dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah adalah: 82 wali nagari, 81 laki-laki, 1 perempuan. 16 camat, 15 laki-laki dan 1 perempuan. Tenaga perencanaan di Bappeda 10 laki-laki dan 17 wanita. OPD terkait sekitar 60% laki-laki dan 40 % perempuan. KAN 100% laki2, Bundo Kanduang 100 % perempuan, PKK dan	Pengukuran Hasil Indikator Gender Output: Terhimpunnya usulan dari masyarakat berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang responsif Gender Outcome : tersusunannya RKPD yang responsif Gender

	% Laki-laki dan 40 % wanita. Forum Anak dan Perempuan 2. Dalam pelaksanaan musrenbang jumlah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat, laki-laki sebesar 70 % perempuan 30%	lebih terfokus kepada infrastuktur dan pelatihan keterampilan					Darmawanita 100 % perempuan, UPT dikecamata 60 % Laki-laki dan 40 % wanita. Forum Anak dan Perempuan	

Lubuk Basung, 20 April 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM BAPPEDA

Drs. Welfizar, M.Si

NIP. 197406061993031002

Tim Driver PPRG Kab. Agam:

1. Andri, ST. MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, MSi. (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, SPd. M Pd.T (BKD)
4. Yulhendri, SKM. MKes (Dinas dalduk KB PPPA)

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kabid	
Kasubag/Kasubid	
Staf	

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN AGAM

PROGRAM : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH **Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (pemeriksaan Kasus)** **Tujuan : Tertanganinya Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah**	a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (5) b. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020.	**Akses :** Jumlah kasus yang menjadi Objek Pemeriksaan dibandingakan dengan jumlah fungsional APIP yang memeriksa **Partisipasi :** a. Belum adanya solusi penyelesaian terhadap kasus – kasus yang lebih dominan pada saat ini seperti kasus Perceraian ASN dengan intensitas perempuan lebih tnggi dari pada laki – laki yang mengajukan permohonan perceraian **Kontrol :** Belum lengkapnya dokumen penanganan kasus pengaduan masyarakat yang akan ditangani Belum adanya Data Base	Keterbatasan anggaran Belum dilakukan koordinasi dengan instansi terkait a. Belum ada data terpilah, b. Kebijakan masih bias gender c. Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran belum semua berdasarkan permasalahan yg ada (basic data) masih meneruskan kegiatan tahun sebelumnya	1. Kurangnya pemahaman tentang terhadap Pembinaan dan Pengawasan terhadap OPD yang diperiksa. 2. kurangnya komitmen kepala OPD untuk menindak lanjuti hasil pengawasan	Melakukan Komitmen kepala OPD untuk menindak lanjuti hasil pengawasan	• Rapat Koordinasi lintas sector (seperti Bag.Hkm, Bappeda, dll) • Merancang Peraturan Perundang – undangan mengenai Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan • Melakukan pengaksesan data melalui Aplikasi tentang pelaksanaan tindak lanjut. • Melakukan sosialisasi dan evaluasi monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan • Surat Edaran dari Kepala Daerah/Kepala OPD yang berisi instruksi langsung kepada Para Tokoh Masyarakat ttg kewajiban untuk menghadiri undangan sosialisasi	Capaian indikator Pembinaan dan Pengawasan terhadap 142 Objek Pemeriksaan target tahun lalu sebanyak 86.73%	Output presentase SKPD yang bebas dari penyimpangan Outcome : meningkatan akuntabilitas kinerja audit.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- Jumlah Fungsional APIP yang melakukan Pembinaan sebanyak Perempuan :25 Orang dan Laki – laki 16 Orang - Jumlah cakupan penanganan kasus yang diselesaikan sebanyak 48 kasus yang di Pemeriksa a. Penyusunan (Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 b. penginventarisir penanganan kasus pengaduan masyarakat yang akan ditangani	Penyelesaian Kasus pengaduan masyarakat yang akan ditangani **Manfaat :** tercapianya penyelesaian kasus pengaduan 85%						

Tim Driver PPRG Kab. Agam.

1. Andri, ST. MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, MSi. (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, SPd. M Pdt (Bakeuda)
4. Yulhendri SKM. MKes (Dinas dal duk KBPPPA).

Lubuk Basung, April 2020

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM INSPEKTORAT

DAFRINES,SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19611018 198103 1 003

GAP (Gender Analysis Pathway)

OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
Kabupaten Agam

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah **KEGIATAN:** Pengelola Belanja Daerah **Out Put :** Bendahara Pengeluaran dan PPK OPD **TUJUAN:** Peningkatan Pemahaman Bendahara Pengeluaran dan PPK seluruh OPD se Kab.Agam	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana KeDepan**		**Pengukuran Hasil**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar (Base-line)**	**Indikator Gender**
	• Pencapaian Peserta Bimtek sebanyak 43 orang dengan peserta perempuan sebanyak 34 Orang dan 9 Orang laki-laki.Bendahara pada masing-masing OPD masih didominasi perempuan. • Tenaga yang melakukan pelayanan sebanyak 10 orang (perempuan 5 orang dan laki-laki 5 orang). • Sarana Komputer untuk menjalankan aplikasi pengelola keuangan	***Akses*** Peserta yang diundangdalamkegiatanBimtek Pengelola Keuangan Daerah bendahara pada masing – masing OPD ***Partisipasi*** Masih sedikitnya jumlah bendahara laki – laki karena perempuan lebih teliti dari laki-laki ***Kontrol*** ***Manfaat*** Bimbingan teknis ini bertujuan agar Terlatihnya bendahara disetiap OPD dalam Tata Kelola Keuangan Daerah	▪ Terbatasnya jumlah tenaga Perbendaharaan karena kurangnya SDM ▪ Terbatasnya komputer dalam pengelolaan keuangan ▪ Pemahaman terhadap Pengelolaan keuangan masih rendah	▪ Jaringan yang terkadang bermasalah sehingga aplikasi pengelolaan keuangan tidak lancar ▪ Tenaga pengelolaan keuangan dari OPD tidak disiplin ▪ Adanya anggapan bahwa laki-laki tidak cocok dalam pengelolaan keuangan	Peningkatan Ketrampilan dan Pemahaman Pengelola Keuangan Daerah pada seluruh OPD se Kab.Agam	• Mengiventarisasi pengelola keuangan di OPD • Melaksanakan Bimtek terhadap Pengelola Keuangan • Melakukan monitoring dan evaluasi	• Pencapaian Peserta Bimtek sebanyak 43 orang dengan peserta perempuan sebanyak 34 Orang dan 9 Orang laki-laki.Bendahara pada masing-masing OPD masih didominasi perempuan.	**Output :** Meningkatnya kompetensi Pengelola keuangan di OPD Petugas pengelola keuangan mampu menjalankan aplikasi keuangan **Outcome :** Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

Tim Driver PPRG Kab Agam.
1. Andri . ST . MT (Bappada)
2. Gusri Noval . MSi (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianti . SPd . M PdT (Bakeuda).
4. Julhendri . SKM . MKes (Dinas dalduk KBPPPA)

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Program : PeningkatanKualitas Kelelmbagaan Koperasi **Kegiatan :** Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan UKM (DAK) **Tujuan :** Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan pelaku usaha	1.Jumlah penduduk Kab. Agam Laki-laki 238.326 perempuan 245.962 2.Jumlah usia produktif di Kab. Agam laki-Laki , 148.466 Perempuan 153.054 3. Jumlah UMKM Di Kabupaten Agam 15.811 UKM yang terdata. 4. Pengertian - Mikro Usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 Juta - Kecil Usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih 50 juta sampai 500 juta - Menengah Usah	**Akses** Kurangnya informasi jumlah dan tempat Pelaku UMKM **Partisipasi** Jenis pelatihan yang diberikan lebih banyak untuk jenis usaha yang digeluti oleh perempuan **Kontrol** Otoritas kegiatan ini sepenuhnya ada pada penyelenggara kegiatan **Manfaat** Kelembagaan yang terbentuk kurang efektf	-Belum ada pendataan dan identifikasi terkait dengan aspirasi dan kebutuhan dari pelaku UMKM - Pelaksana kegiatan belum sepenuhnya paham mengenai kegiatan yang responsif gender - Kurangnya sumber daya yang tersedia untuk pembinaan pada pelaku usaha - Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan	- Banyaknya anggapan di masyarakat bahwa pekerjaan menyulam, membordir dan memasak adalah pekerjaaan perempuan - Topografi wilayah yang berbeda	- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan pelaku usaha pemula	- Melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha -Memberikan informasi kepada pelaksana kegiatan perlunya pelaksanaan kegiatan yang responsif gender - Meningkatkan kompetensi petugas yang melakukan pembinaan - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha	Pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak 190 orang laki-laki 35 orang, perempuan 155 orang.	- Terwujudnya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah - **Output** Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan - **Outcome** Meningkatnya SDM Pelaku Usaha

	produktif yang memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai 10 milyar 5. Pendapatan Perkapita di Kab Agam 6. Jumlah Pengangguran angkatan kerja laki-laki 7.785, perempuan 5.357 7. Jenis-jenis usaha UMKM di Kab Agam : a. Industri 5.836 UKM b. Dagang dan Jasa 9.980 UKM 8. Data pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan tahun 2017 laki-laki 11 orang, 49 orang perempuan. Tahun 2018 laki-laki 19 orang, 51 orang perempuan. Tahun 2019, laki-laki 5 orang, perempuan 55 orang 9. Jumlah petugas pembina UMKM							

	di dinas 3 orang (ASN), 3 orang pendamping.							

Tim Driver PPRG kab. Agam.

1. Andri, ST. MT. (Bappeda).
2. Gusri Noval. M.Si. (Inspektorat)
3. Supria Asdel Erianto, SPd. M.Pd.T (BKD)
4. Yulhandri, SKM. MKes (Dinas Dalduk KB PP PA).

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
KECAMATAN MATUR TAHUN ANGGARAN 2021

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Pengembangan Operasional Wilayah Kecamatan Kegiatan Pembinaan Nagari Tujuan : Terujudnya Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari Out put: Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	• Pembinaan dilaksanakan setiap bulannya selama 12 bulan ke masing-masing Nagari • Melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Nagari • Melakukan pembinaan Administrasi terhadap perangkat Nagari • Melakukan pembinaan dalam rangka lomba nagari	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN			
		Faktor kesenjangan 1. Adanya kesenjangan pada mamfaat aspek yang telah dilakasanakan selama melakukan pembinaan 2. Kurangnya peran partisipasi perangkat nagari terhadap pembinaan yang dilakukan	1. Kurang nya Kapasitas SDM Pihak Kecamatan terhadap pengarusutuamaan gender (PUG)dalam pembangunan 2. Tidak tepatnya pendekatan yang dilakukan oleh Tim Pembinan kecamatan dalam pengarusututamaan gender 3. Kurangnya jumlah DSM dalam melakukan	1. Kurangnya respon masyarakat terhadap sebahagian perangkat Kecamatan 2. Adanya perubahan nilai-nilai norma yang terjadi pada perangkat nagari yang lebih bersifat materialistis	1. Meningkatkan kapasitas Aparatur Nagari tentang pemahaman PUG dalam pembangunan Nagari 2. Meningkatkan pengetahuan tenaga pengajar	1. Mengadakan pelatihan /sosialisasi tentang perngarusutamaan gender untuk Tim Pembina Kecamatan 2. Melakukan pelatihan/ sosialisasi Pengarusutamaan gender terhadap perangkat Nagari 3. Melakukan pelatihan atau sosialisasi bagi Tim Kecamatan tentang komunikasi efektif tentang pengarusutamaan	Pembinaan yang dilakukan selama ini lebih banyak ke Bidang Adminstrasi sebanyak 90 % sedang pembinaan yang dilakukan pada aspek Sosial terutama yang Responsif gender hanya 10 % (kurang	Indikator Out put Terlaksananya 12 kali pembinaan ke Nagari dengan porsi 50 % yang bersifat Administrasi dan 50 % bersipat aspek sosial yangbersifat responsif gender Indikator out come Terciptanya Tertib adminstrasi di

	• Adanya kesenjangan Gender dalam pembinaan • Selama ini dilakukan pembinaan pada Aspek Administrasi mencapai 90% sedangkan pembinanaan dilakukan bersifat aspek sosial Cuma 10 %	terutana tentang kesetaraan gender	pembinaan			gender 4. Pendekatan antar hubungan manusia/komunikasi yang efektif antara perangkat dan pembina kecamatan 5. Membuat bahan bahan KIE Tentang pengaruh Pengrusutamaan gender dalam pembangunan 6. Melakukan pembinaan yang Responsif gender secara Reguler ke Pemerintahan Nagari 7. Mengusulkan tambahan SDM ke Dinas terkait	terlaksana)	nagari akan lebih baik Terlaksana program sosial yang responsif gender

Tim driver PPRG kab Agam.

1. Andri, ST. MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, MSi. (Inspektorat).
3. Sutria Asdel Erianto. S.Pd, M.Pd T (Bakesbda)
4. Zulhendi, SKM. MKes (Dinas dalduk KB PPPA)

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA SETDA AGAM
PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur **Kegiatan :** Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan **Tujuan :** Terwujudnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan	Informasi terkait kegiatan - SDM yang ada di Bag. PBJ/Sekrt. ULP sebanyak 7 orang, terdiri dari: • Laki-laki: 4 orang • Perempuan 3 org - Jumlah pejabat fungsional pengadaan: • Laki-laki: 2 • Perempuan: 1 org - Jumlah ASN yg menjadi Anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP 13 orang: • Laki-laki : 9 orang • Perempuan: 4 orang - Honor Pokja 1. Pengadaan Barang: • Pagu 200 jt -2.5 M : 500.000- • Pagu>2.5 M : 750.000-	- Beban ganda dari ASN perempuan	- Kurangnya pejabat pengadaan/ Pokja Pemilihan Penyedia barang/jasa	Rawan intervensi dan pengaduan ke APH dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Terwujudnya pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan	- Menjadikan anggota Pokja permanen di Bagian PBJ - Fasilitasi ASN untuk Bimtek/Diklat/ Ujian Sertifikasi pengadaan barang/jasa - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa	- Jumlah pengadaan barang/jasa tahun 2020: 80 paket pekerjaan	**Output :** Fasilitasi pengadaan barang/jasa **Outcome:** Meningkatnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	2. Jasa konstruksi • Pagu 200jt-2.5M : 750.000,- • Pagu>2.5 M : 1.000.000,- 3. Jasa Konsultansi • Pagu 100jt-750jt: 750.000,- • Pagu>750jt : 1.000.000- 4. Jasa lainnya • Pagu 200jt-2.5M : 500.000- • Pagu> 2.5M : 750.000,- - Sarana dan prasarana yang ada: • Meja 16 unit • Kursi 29 unit • Komputer 11 unit • Laptop 7 unit • Printer 6 unit • Proyektor 3 unit • UPS 2 unit • Wifi 2 (Intranet dan Internet)							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	- Intensitas kerja di UKPBJ cukup tinggi dari siang sampai malam - Jumlah pengadaan barang/jasa tahun 2020: 80 paket pekerjaan - Nilai pagu tender : Rp.162.495.375.399,- - Dengan nilai kontrak: Rp 98.136.907.575,-							

Tim driver PPRG kab Agam

1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, MSi (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto S Pd, M.PdT (Bakeuda)
4. Yulhendri, SKM. MKes (Dinas dalduk KBPPPA).

Lubuk Basung, Juni 2020
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SETDA

ZUFREN, SP.
NIP. 19710224 200003 1 002

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM

Langkah 1	**Langkah 2**	**Langkah 3**	**Langkah 4**	**Langkah 5**	**Langkah 6**	**Langkah 7**	**Langkah 8**	**Langkah 9**
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Prgram: Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun **Kegiatan:** Peningkatan Sarana dan prasarana SD (DAK Fisik) **Out Put Kegiatan:** **Tujuan:** Terlaksananya Pembangunan	Data terpilah: Jumlah Sekolah SD: 442 Jumlah Siswa: 53.991 Siswa SD Laki-Laki = 28.356 Org Siswa SD Perempuan: 25.635 org WC Laki-laki: seharusnya 1.134 unit, WC Perempuan: seharusnya: 1.281	Ada ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan khususnya ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi. Akses perempuan untuk mendapatkan sarana air bersih dan sanitasi masih kurang.	• Kurangnya pemahaman persoalan gender bagi pengambil kebijakan khususnya terhadap kebutuhan sarana air bersih dan sanitasi (WC) bagi siswa perempuan dan Laki-Laki • Desain WC untuk Laki-laki dan	• Usulan Kepala sekolah yg belum memperhatikan kebutuhan WC siswa perempuan dan laki-laki • Kurangnya pemahaman kepala sekolah dan guru tentang persoalan gender	Tersedinya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi bagi siswa baik laki-laki maupun perempuan	• Mereview rancang bangun WC untuk laki-laki dan perempuan • Sosialisasi ke pada kepala sekolah tentang kesetaraan jender dalam pengadaan sarana dan parana sekolah, khususnya sanitasi/wc • Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	WC Laki-laki: yang ada 700 unit, WC Perempuan: yang ada 600 unit. WC yang dibutuhkan: WC siswa laki-laki: 534 unit WC Siswa Perempuan: 681 unit	Output: Terbangunya Kebutuhan WC/Sanitasi: WC siswa laki-laki: 534 unit WC Siswa Perempuan: 681 unit Outcome: Terpenuhinya Kebutuhan Sanitasi dan air bersih seluruh siswa baik siswa laki-laki

Sarana Prasarana SD (Jamban Sekolah) yang seimbang antara laki-laki dan perempuan **Hasil:** Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah (Jamban Sekolah)dan yang layak	unit. Dengan Rasio kebutuhan WC antara laki-laki 25 : 1 dan perempuan 20 : 1 berdasarkan Permendikbud	Manfaat dari pembanguan sarana air bersih dan sanitasi untuk siswa SD masih belum dinikmati oleh sebagian siswi perempuan.	perempuan					maupun Perempuan secara seimbang

TIM DRIVER PPRG Kab. Agam :

1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Erianto, S.Pd, M.PdT (Bapelitbangda)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (Dalduk KB PP PA)

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN AGAM

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender
Identifikasi dan tuliskan tujuan dari Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin : -kuantitatif - kualitatif	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukenali isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender	Temukenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender	Tetapkan base-line	Tetapkan indikator gender
Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Kantor Camat Ampek Angkek Tujuan Menyediakan Ruang Kantor Yang	1. Bahwa Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin Kec. Ampek Angkek tidak sama antara jumlah laki laki dan perempuan. 2. Bahwa penduduk berdasarkan usia (struktur	Belum adanya bangunan kantor camat yang reponsive terhadap gender Akses: Minimnya fasilitas yang responsive gender di Kantor Camat .	Belum adanya rencana DED kantor Camat yang responsive gender 1. Minimnya pemahaman SKPD PUTR terhadap pengarusutama an gender sehingga pada tahap	1. Belum tingginya tuntutan masyarakat terhadap pengarusutra maan gender. 2. Kurang terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan	Tersedianya ruang gedung kantor yang representatif dan responsive gender.	1. Mengadvokasi penentu kebijakan (pemerintah daerah dalam pengarustutam aan gender dalam semua sektor termasuk bidang ke Pekerjaan Umum. (perda, perbub PUG)	Belum adanya gedung kantor camat di Kabupaten Agam yang representative dan responsive gender	Terbangunya Gedung yang representative dan responsive Gender dengan ciri: 1. Tersedianya toilet yang responsive gender (Pria/Wanita dan Disabilitas) 2. Tersedianya Aksesibilitas yang responsive gender (Pria/Wanita dan Disabilitas)

Representatif	umur) juga memerlukan perlakuan khusus dalam penyediaan fasilitas terutama anak-anak dan penduduk usia lanjut. 3. Bahwa penduduk yang menyandang disabilitas juga perlu mendapat perhatian dalan penyedian fasiltas sebuah kantor, terutama kantaor-kantor yang fungsi utamanya adalah pelayan masyarakat. 4. Bahwa tamu-tamu kantor camat pada umumnya dapat diklasifikasikan terhadap gender sehingga fasilitas yang dibangun sebaiknya sesuai dengan karakteristik gender	Manfaat: 1. Manayarakat belum merasakan kantor camat yang responsive gender.	perencanaan belum mempertimbangkan masalah gender (jenis kelamin, disabilitas, umur dll) 2. Keterbatasan dana dalam pembangunan. (lebih mahal)			2. Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk pelaksanaan bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 3. Menjalankan kebijakan responsive gender dalam pembuatan DED bangunan gedung kantor. 4. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan DED yang responsive gender. 5. Evaluasi pelaksanaan responsive gender pada dinas Pekerjaan Umum		3. Tersedianya ruangan bagi Ibu Menyusui, 4. Tersedianya ruangan tempat bermain anak. 5. Tersedianya tempat sholat. 6. Tersedianya ruangan bagi perokok.

	masyarakat. 5. Pada saat ini belum ada Kantor Camat yang sudah responsive gender.							

Tim Driver PPRG Kab Agam

1. Andri. ST.MT. (Bappeda)
2. Gusri Noval. MSi (Inspektorat)
3. Sufria Abdul Eriantu. SPd. M Pd.T (Bakeuda)
4. Yulhendri SKM Mkes (Dinas dalduk KBPPPA).

Lubuk Basung, Juni 2020
a.n Kepala Dinas PU dan Tata Ruang
Kabupaten Agam

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

RUDI HARISON, ST., M.Si
NIP. 19720901 199903 1 004

FORMAT GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
	1. Di Kecamatan Tanjung Mutiara ada 3 Nagari. 2. Frekwuensi pembinaan terhadap pemerintah nagari sebanyak 12 kali dalam setahun untuk masing-masing nagari. 3. Pembinaan Pelayanan, Pembinaan Pembuatan Aministrasi Kependudukan, Pembinaan	Data Pembuka Wawasan : 1. Kurangnya Partisipasi dari perangkat nagari dalam kegiatan pembinaan yang diadakan oleh kecamatan 2. Kurang Manfaat yang dirasakan oleh perangkat nagari dari kegiatan pembinaan terutama tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Sebab Kesenjangan Internal : 1. Kurangnya Kompetensi SDM pada Kantor Kecamatan tentang Pengarusutamaan Gender. 2. Kurangnya jumlah SDM kecamatan untuk melakukan Pembinaan terhadap aparatur nagari . 3. Tidak Tepatnya Pendekatan yg dilakukan	Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Kurangnya respon dari Pemerintah Nagari terhadap Pembinaan 2. Adanya Perubahan Nilai dan Norma yang ada pada perangkat nagari menjadi lebih materialistis.	Reformulasi Tujuan Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nagari	Rencana Aksi 1. Mengadakan Pelatihan/Sosialisai terhadap Tim Pembinaan yang ada di Kantor Kecamaan tentang Pengarus Utamaan Gender 2. Melakukan pelatihan/sosialisasi untuk perangkat nagari tentang Pengarusutamaan Gender. 3. Melakukan Pelatihan atau sosialisasi bagi tim pembinaan	Data Dasar (Base-line) Pembinaan yang dilakukan selama ini lebih banyak pada aspek Administrasi (90%) sedangkan pembinaan tentang aspek sosial terutama yang responsive gender kurang terlaksanakan (10%).	Indikator Gender **Indikator Keluaran (out put) :** Terlaksananaya 12 kali pembinaan terhadap Perangkat nagari dengan proporsi 50 % tentang Administrasi dan 50 % Aspek Sosial yang reponsif gender **Indikator out come :** Tertib administrasi dinagari akan lebih baik dan program-sosial di nagari responsif gender

	Adminitrasi Keuangan dan Pembinaan Pembangunan Infrastruktur. (Pembinaan yang selama ini dilakukan masih netral gender.) atau lebih banyak mengenai admistrasi (90 %)		oleh tim pembinan kecamatan ke pemerintah nagari			kecamatan tentang komunikasi efektif 4. Membuat media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan mendistribusikan nya ke Masyarakat tentang Pengarus Utamaan Gender. 5. Melakukan pembinaan responsif gender secara regular ke pemerintah nagari		

TIM DRIVER PPRG Kab. Agam :

1. Andri, ST, MT (Bappeda)
2. Gusri Noval, M.Si (Inspektorat)
3. Sufria Asdel Eriarto, S.Pd, M.PdT (Dalkeluda)
4. Yulhendri, S.KM, M.Kes (Dalduk KB PP PA)

Kegiatan Pembinaan Nagari **Tujuan :** Meningkatkan Kapasitas Nagari dalam pelayanan, penyusunan anggaran, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan pembangunan yang sedang dilaksanakan.						6. Mengusulkan penambahan SDM Pembinaan ke Kabupaten/Instansi terkait.		

Tiku, 28 April 2020

CAMAT TANJUNG MUTIARA,

HIDAYATTUL TAUFID, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19840323 200312 1 001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KECAMATAN TANJUNG RAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan	**Data Pembuka Wawasan**	**Isu Gender**			**Kebijakan dan Rencana Ke Depan**		**Pengukuran Hasil**	
		Faktor Kesenjangan	**Sebab Kesenjangan Internal**	**Sebab Kesenjangan Eksternal**	**Reformulasi Tujuan**	**Rencana Aksi**	**Data Dasar (Base-line)**	**Indikator Gender**
KEGIATAN : Pembinaan Nagari TUJUAN : Untuk Meningkatkan Kapasitas Aparatur /Pemerintah Nagari OUT PUT : Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	1. Jumlah Nagari di Kecamatan ada 9 Nagari dan 1 Nagari Persiapan 2. Frekuensi Pembinaan sebanyak 12 kali dalam setahun untuk masing-masing Nagari 3. Pembinaan yang dilakukan Terhadap Administrasi 90% Tentang Administrasi Nagari yang	*Partisipasi :* -Kurangnya Aspek partisipasi dari perangkat nagari dalam kegiatan pembinaan *Manfaat :* -Kurangnya manfaat yang dirasakan oleh perangkat nagari dari kegiatan pembinaan terutama tentang pengarustamaan Gender	1. Kuranganya Kompetensi SDM yang ada pada Kecamatan tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan 2. Kurangnya jumlah SDM dalam melakukan pembinaan 3. Tidak tepatnya pendekatan yang dilakukan oleh tim dengan Perangakat Nagari	1.Kurangnya respon dari pemerintah Nagari terhadap kegiatan pembinaan dari Kecamatan 2. Adanya perubahan Nilai dan Norma yang ada pada perangkat nagari menjadi lebih materialistis	1.Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan nagari tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nagari	1. Sosialisasi /Pelatihan tentang pengarusutamaan Gender bagi Tim Pembina di Kecamatan 2. Sosialisasi atau pelatihan tentang komunikasi efektif bagi tim pembina dikecamatan 3. Membuat dan mendistribusikan bahan-bahan KIE tentang edukasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1. Dari 12 kali Pembinaan yang dilakukan selama ini pada 9 (sembilan) nagari lebih banyak pembinaan administrasi (90%), sedangkan pembinaan aspek sosial terutama yang responsif gender kurang terlaksanakan (10%)	*Indikator Keluaran (Out Put) :* - Terlaksanan ya 12 kali pembinaan terhadap perangakat nagari dengan proporsi 50 % aspek administrasi dan 50% tentang aspek sosial yg responsif gender *Indikator Out Came :* - Tertib

	sudah dilakukan pada 9 (sembilan) nagari dan 10% tentang Pembinaan Sosial termasuk aspek gender					4. Melakukan pembinaan yang responsif gender secara reguler (rutin) ke pemerintahan Nagari 5. Mengusulkan tambahan SDM ke Kabupaten /dinas terkait		administrasi dinagari akan lebih baik dan terlaksanan ya program-program yang Responsif gender di nagari .

Tim driver PPRG kab Agam.

1. Andri, ST, MT (Bappeda).
2. Gusri Noral, MSi (Inspektorat)
3. Sufria Asdal Erianto, SPd, MPdT (Bakeuda)
4. Yulhendri, SKM, MKes (Dinas dalduk KBPPPA).